



PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN KELAS 1A KHUSUS

JL. Ampera Raya NO. 133 Ragunan Jakarta Selatan

Tel. 62.21.7805909. Fax. 62.21.7805906

Email : informasi@pn-jakartaselatan.go.id delegasi pnjs@yahoo.com

Website : pn-jakartaselatan.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: W10.U3/092/KP.01.5/2/2017

DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH HAKIM DAN PEJABAT STRUKTURAL/
FUNGSIONAL SERTA PARA PEGAWAI DAN HONORER PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN UNTUK HADIR DALAM ACARA RAPAT EVALUASI BULANAN
YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA:

HARI : RABU
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2017
JAM : 08.30 WIB
TEMPAT : RUANG SIDANG UTAMA
(PROF. H. OEMAR SENO ADJI, SH)

ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH

JAKARTA, 6 FEBRUARI 2017

SEKRETARIS

H. AHMAD HAKIR, SH., MH



**NOTULEN RAPAT BULANAN
TANGGAL 8 FEBRUARI 2017
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**

Pimpinan Rapat : Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Sekretaris Rapat : Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Notulis : Astrid Hastridian, SH., MH

Agenda Rapat :

1. Pengarahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai SIPP, Tilang Online, Surat Menyurat, Akreditasi, Minutasi Perkara, Pengaduan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tupoksi dan SOP dan kode etik Hakim, kode etik Panitera dan Jurusita, serta kode etik Pegawai Mahkamah Agung RI.
2. Pengarahan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai kekompakan, akreditasi, disiplin, apel, penahanan dan administrasi persidangan.
3. Evaluasi atas permasalahan yang diperiksa pada rapat sebelumnya.
4. Pengarahan Panitera mengenai minutasi dan pola mutasi PP, JS dan JSP.
5. Pengarahan Sekretaris mengenai akreditasi dan SK Area Kebersihan.
6. Tanya jawab.

Isi Notulen Rapat Bulanan :

Pada hari ini Rabu, tanggal 8 Februari 2017 di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dilakukan Rapat Bulanan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri yang dihadiri oleh Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris dan Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Rapat evaluasi pada hari ini dimulai dengan himbauan dari Ketua Pengadilan Jakarta Selatan:

- Evaluasi hasil rapat bulan Januari:
 1. Tilang online sesuai dengan Perma No. 12/2016, sudah mulai dilaksanakan untuk kelompok DKI Jakarta, dimulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selatan dan Pusat, terakhir Timur.
 2. Telah dilaporkan pula pada KMA, pelaksanaan tilang online sudah berjalan sesuai dengan Perma dan calo sudah berkurang. Pada saat itu kendala yang dihadapi adalah berkas tilang Polres tidak terstruktur, sehingga kesulitan untuk menentukan jenis pelanggaran. Kendala pada saat ini soft copy dari Polda dan Polres belum sesuai dengan kertas tilang (jenis pelanggaran). Rumus untuk memasukan denda terkadang menjadi tidak sinkron.
 3. Soft copy selama ini dikirimkan langsung ke Kejaksaan. Kedepannya manfaatkan teknologi dengan dikirim melalui email.
 4. Mekanisme keberatan ditutup, kecuali hukuman badan (misalnya: kurungan 3 hari).
 5. Kejaksaan belum siap diterapkan tilang online, baru Kepolisian dan Pengadilan.
 6. Kejaksaan meminta BRI untuk mempergunakan mobil kas BRI untuk standby pada hari Jumat.
 7. Proses surat menyurat agar lebih tertib dan terdisposisi. Mohon Kasub Umum untuk memperhatikan surat masuk. Agar segera dinaikan ke KPN. Mohon diperhatikan surat-surat penting harus segera dijawab.
 8. Sehubungan dengan akreditasi yang telah kita capai, kinerja kita harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi.
 9. Minutasi perkara agar lebih diperhatikan. Kepada PP apabila Hakim sudah tanda tangan segera diminutasi.
 10. Panmud Perdata mohon dikikis JS dan JSP yang tidak menjalankan tugasnya. JS dan JSP yang tidak ingin bekerja profesional, bisa digeser dari PN Jakarta Selatan. PN Jakarta Selatan adalah orang-orang terbaik. Apabila tidak benar akan diusulkan kepada Dirjen untuk dicabut jabatan JSPnya.
- Persentase SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada saat ini adalah 26,23%. Pada saat ini posisi SIPP PN Jakarta Selatan masih tertinggi di wilayah PT Jakarta, namun kita jangan

sampai langkah dan masih harus melakukan peningkatan SIPP kita lagi karena Pengadilan lain di Jakarta akan menyusul persentase SIPP kita.

- Laporan Pengaduan bisa langsung dikirimkan secara online melalui SIWAS.
- Hakim dan PP yang disebutkan dalam wa untuk minutasikan harap segera minutasikan. Apabila lebih dari 3 perkara yang belum diminutasikan buat kontrak kinerja.
- Selalu berhati-hati, pekerjaan kita dipantau pimpinan. Pada saat peresmian gedung MA, seluruh Ketua Tingkat Banding dikumpulkan termasuk KPN/KPA se DKI Jakarta. Dibahas temuan-temuan TIM MA. 10 Orang direkrut, diberikan pendidikan KPK, dibekali peralatan lebih canggih dari KPK. MA terus berbenah diri.

Rapat evaluasi selanjutnya dilanjutkan dengan himbauan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

- Mari kita jaga kekompakan, pertahankan akreditasi, selalu disiplin dan mengikuti apel. Apel senin dan jumat bukan merupakan maunya pimpinan tetapi Dirjen, apabila tidak senang silahkan bersurat ke Dirjen. Diingatkan kepada bagian Kepegawaian, 3 kali tidak ikut apel dibuat daftarnya.
- Untuk penahanan yang habis sesuai SIPP, pada mulanya penahanan 30 dan 60 hari berdasarkan kebijakan Panmud Pidana sebelumnya dihandle oleh staf Pidana. Namun sesuai SOP, penahanan 30 dan 60 hari dikembalikan ke PP untuk perpanjangannya.
- Kita harus memberikan pelayanan prima. Apa yang kita dapatkan hasil seluruh PN Jakarta Selatan. Kita hidupkan mesin di PN Jakarta sesuai dengan SOP.
- Penetapan sidang pertama terlambat diterima Kejaksaan, maka tahanan tidak akan dibawa. Perhatikan penetapan-penetapan segera dikirimkan ke Kejaksaan.
- Tahanan perpanjangan penahanan terlambat. Mohon yang sudah-sudah jangan seperti itu lagi. Sampai dikantor cek sidang apa hari ini. Cek penahanan dalam agenda. Bukan hanya PP tetapi hakimnya juga harus memantau.
- Perkara banding, pernyataan banding terlambat dikirim ke PT dengan alasan tidak ditahan. Amar putusan belum ada, begitu putus harus sudah ada amar putusannya. Apabila ada yang banding sudah siap untuk dibuatkan pernyataan banding. Hakim harus mengawasi PPnya.
- Hakim pengawas bidang akan segera disusun lagi, karena banyak yang mutasi. Hakim pengawas yang masih ada, segera buat laporan.
- Sesuai SOP, segera dibuatkan SK Honorar dan Tenaga Sukarela.
- Tim kikis minutasikan harus dibentuk kembali.

Tambahan dari KPN :

- Sidang pertama yang tidak jalan, akan ditelp Kajari kirim secara online. Ada 1 orang yang bertanggung jawab (meminta staf Kajari) untuk menyampaikan pada JPU.
- Perkara banding yang belum dikirim, ditahan namun berkas belum sampai. PT akan memaknai peringatan I. Mohon untuk diantisipasi. Kekurangan berkas Perdata, mohon segera dilengkapi. Delegasi langsung menyurati KPT dan KPT menyurati kita.
- Pemberitahuan Kontra Memori, apabila 2 minggu tidak diserahkan segera kirim ke PT.
- Surat kuasa harus asli, tidak boleh terima copy.
- Pelayanan dilakukan melalui loket, jangan sampai ada yang menerima tamu dalam ruangan.
- Leges bukti tidak dipungut biaya, bukti cukup leges di kantor pos tidak didaftarkan di Kepaniteraan Hukum lagi.
- PP yang masih belum selesai minutasikan namun mutasi jangan dulu diberi perkara.

Rapat evaluasi selanjutnya dilanjutkan dengan himbauan dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

- Sesuai dengan rapat PP dan Panmud, minutasikan perkara segera dilakukan setelah diputus. Surat dari PT dan MA banyak berkas yang kurang. Mohon dicek kembali oleh Panmud di ceklist. Kirim segera berkas yang kurang.
- JS dan JSP menjalankan putusan sesuai SOP.
- Sesuai dengan hasil rapat di Dirjen mengenai pola mutasi PP, JS dan JSP, pada saat ini sedang disusun SK KMA mengenai pola mutasi. Bekerja yang baik. Untuk pengusulan PP, JS dan JSP harus ditest. Tim di PN, test di PT lagi. JSP dibawah Dirjen, tidak lagi dibawah sekretaris.

Rapat evaluasi dilanjutkan dengan himbauan dari Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

- Tugas kita sekecil apa dipantau oleh Pak Dirjen.
- Kita harus lebih waspada dan bekerja sesuai SOP.
- Kita harus mempertahankan akreditasi yang sudah dicapai dan kita harus melaksanakan apa yang digariskan akreditasi.
- Sesuai hasil rapat struktural, untuk area-area kebersihan dibuatkan sk baru. Namun sk belum juga disampaikan kepada Ketua.

Rapat dilanjutkan dengan tanya jawab

1. Made Sutrisna, SH., M. Hum
 - Mengelola dana sinoman semenjak Ketua sebelumnya. Saat ini saldo sinoman mengecil. Potongan apakah tetap atau dinaikkan. Pada saat ini Hakim Rp. 50.000,-. Pejabat Struktural Rp. 30.000,- dan Staf Rp. 25.000,-.
 - Rekreasi diundur menjadi tanggal 4-5 Maret 2017.
2. Guntur, SH
 - Ketika input hari sidang pertama, pada saat itu juga bisa di lihat dalam SIPP.
 - SIPP delegasi belum optimal, sehingga mempengaruhi rasio penanganan perkara.
 - SIPP e-doc belum lengkap template putusan.
 - Petitum dalam perkara Permohonan belum lengkap.
3. H. Ratmoho, SH

E-doc perkara Pidana banyak yang masih kosong, harus dimintakan CD Dakwaan pada saat memasukkan berkas.

Tanggapan KPN :

1. Untuk dana sinoman bisa dinaikkan, karena untuk kepentingan bersama juga uangnya.
2. Untuk delegasi jangan sampai SIPP nya kosong.
3. Menunda sidang jangan terlalu lama, jangan lebih dari 2 minggu.
4. Mengenai melihat jadwal sidang pertama dalam SIPP, akan segera disurati Kejaksaan.

Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menutup rapat pada hari ini dengan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta rapat.

Sekretaris Rapat,

H. Ahmad Hakim, S.H., M.H.

Notulis,

Astrid Hastriadian, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pimpinan Rapat



Pim Haryadi, S.H., M.H.

